OSS Permudah Pelaku Usaha Urus Izin

KUDUS - Online Single Submission (OSS) atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE) telah diresmikan di Kudus sejak 2 November 2018 lalu. Sistem perizinan tersebut dapat diakses oleh pelaku usaha secara 'online'. Artinya, para pengusaha tak perlu datang ke kantor peizinan tapi cukup mengakses lewat gawainya.

Bupati Kudus H.M. Tamzil mengungkapkan, OSS memudahkan para pelaku usaha. Namun, H.M. Tamzil mengakui keberadaan OSS masih belum diketahui masyarakat dengan baik. Pasalnya, masih banyak pelaku usaha belum memanfaatkan OSS. “Sebenarnya proses dalam OSS tidak berat, hanya saja masyarakat masih belum akrab dengan sistem perizinan berbasis online,” ujar H.M. Tamzil saat menghadiri rapat paripurna DPRD pada Selasa (30/4) siang.

Jika pelaku usaha mengalami kesulitan dalam mengisi OSS, H.M. Tamzil meminta mereka datang langsung ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Pelaku usaha akan dibantu petugas mengisi OSS dengan catatan sudah membawa persyaratan lengkap.

Selain terkait OSS, H.M. Tamzil menjelaskan akun sosial media "Lapor Tamzil" sangat mudah diakses oleh masyarakat. Sebanyak kurang lebih 25 laporan dan keluhan masyarakat mengenai pelayanan fasilitas publik telah dicek H.M. Tamzil untuk selanjutnya ditindak lanjuti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. "Akun sosial media Lapor Tamzil mudah diakses oleh masyarakat. Silakan melaporkan pelayanan publik ke Facebook, Twitter, WhatsApp, maupun Instagram. Tinggal tulis saja ke sosial media terkait, nanti akan direspon," jelasnya.

Sementara itu, wakil ketua DPRD Kudus Ilwani menyampaikan keputusan DPRD Kabupaten Kudus tentang rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2018 Bupati Kudus. Salah satunya terkait OSS yang belum dimanfaatkan secara maksimal. "Pelayanan perijinan belum dimanfaatkan secara maksimal, Pemkab Kudus harus segera menetapkan peraturan yang jelas dan tak bertentangan dengan Undang-Undang yang ada," tuturnya.

Selain itu, ada beberapa rekomendasi dari DPRD untuk berbagai sektor seperti pendidikan maupun tata pemerintahan. Keputusan tersebut selanjutnya ditandatangani oleh ketua DPRD Achmad Yusuf Roni dan bupati Kudus H.M. Tamzil beserta wakil bupati Kudus H.M. Hartopo.